

Paparan Ringkas pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)

Pansus RUU-IKN DPR-RI

8 Desember 2021

Catatan Kecil tentang Pemindahan Ibu Kota Negara

Dari Sudut Pandang Pembangunan Perkotaan yang Berkelanjutan

Wicaksono Sarosa, PhD.

Ruang Waktu Knowledge-hub for Sustainable [Urban] Development

Latar Belakang – Umum

Timbang-timbang Pemindahan Ibu Kota Negara

Wicaksono Sarosa

Penelitian Masalah Perencanaan Lahan Universitas Berkeley Berkeley, Pernah Terlibat dalam Perencanaan Pembangunan Beberapa Kota Baru

Pada 29 April 2019 tersebar berita bahwa Presiden Joko Widodo telah memutuskan ibu kota negara akan dipindahkan dari Jakarta ke luar Jawa. Selain untuk mengurangi tekanan urbanisasi terhadap Jakarta dan mengurangi konsentrasi pembangunan di Pulau Jawa, keputusan ini kabarnya juga dimaksudkan untuk lebih mengaitkan pembangunan di luar Pulau Jawa.

Geopras untuk mendinamiskan ibu kota negara sudah muncul sejak era Presiden Soekarno yang pernah menyebutkan niatnya agar ibu kota negara dipindahkan ke Palangkaraya yang dianggap sebagai “tali pengikat” Nusantara. Kemudian di era Presiden Soeharto, gagasan ini muncul kembali dengan adanya usulan agar Jombang menjadi pusat pemerintahan dengan Jakarta tetap secara simbolik merupakan ibu kota negara. Sekali muncul pendapat itu dan korner di sekian wacana.

Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun pernah ada upaya untuk menampung berbagai masukan dan usulan tentang pemindahan ibu kota. Waktu itu, tahun 2010, penilai kebebasan diundang untuk berbicara di berbagai forum diskusi atau pertemuan terkait usulan tersebut dan menyampaikan aspirasi-masukan yang kurang setuju dengan pemindahan ibu kota. Bukan tidak setuju 100 persen karena sebagai orang yang pernah terlibat dalam perencanaan pembangunan kota-kota baru, penulis tentu sangat “excited” dengan gagasan ini. Namun, setidaknya ada tiga hal yang waktu itu penulis ajukan untuk menjadi pertimbangan sebelum keputusan final

dianthil. Pertama, pembangunan ibu kota baru yang tentu tidak akan mudah dapat meminimalisir “morat marut” karena kemudian akan ditiru oleh semua atau setidaknya sebagian besar provinsi dan kabupaten, yang jumlahnya ratusan.

Jika hal itu terjadi, anggaran pemeliharaan akan lebih banyak dialokasikan untuk membangun kantor dan fasilitasnya sendiri daripada untuk sarana-prasarana yang langsung dibutuhkan oleh masyarakat, seperti sekolah, rumah sakit, gelanggang remaja/talarga, jambatan, dan pelabuhan. Ketika masih banyak anggaran sekolah yang besar, rumah sakit yang ala kadarnya, gelanggang olahraga yang non-ekstrem, jembatan penyeberangan sungai yang ambur-luhur, dan sebagainya, anak-anak pergi ke sekolah harus bergelut dengan pada tali jembatan yang tentu akan berujung kematian; membangun pusat pemerintahan megah yang notabene adalah “fasilitasnya sendiri” tentu sangat tidak bijak.

Kedua, membangun kota baru dari nol—apalagi sebuah ibu kota negara yang tidak bisa asal-asalan—memerlukan waktu puluhan tahun sehingga harus dipastikan kesinambungan dukungannya. Kota baru Bumi Serpong Damai tidak, misalnya, membutuhkan lebih dari 30 tahun untuk menjadi kota yang “mantap” dan hidup seperti sekarang. Pembangunan kota baru—apalagi sebuah ibu kota negara—bukan hanya memerlukan keputusan dukungan finansial yang terus-menerus, melainkan juga dukungan politik yang berkelanjutan walaupun pendapat dan pemerintahan harus berganti karena putaran masa jabatan.

Ketiga, jika tujuannya adalah merevitalisasi pembangunan maka diperlukan kaitan-kaitan pusat EUMN maupun fasilitasnya serta memberi manfaat kepada korporasi swasta untuk memastikan kegiatan mereka di luar Jawa akan jadi memberi dampak pembangunan wilayah daripada hanya pemindahan satu ibu kota ke luar Jakarta.

Sekarang lebih tepat waktu
Wacana pemindahan ibu kota negara waktu itu kemudian tergelendang entah bagaimana akhirnya hingga pertemuan



Presiden pada tahun 2014. Setelah berjalan beberapa saat, gagasan pemindahan ibu kota ini muncul kembali, utamanya ketika Jakarta sedang menghadapi masalah sangat berat, seperti banjir dan kemacetan yang luar biasa.

Bappenas pun ternyata terus melakukan kajian plus minus pemindahan ibu kota ke lokasi lain. Setelah itu, pada 2014, (1) tetap di Jakarta, (2) pusat pemerintahan digeser ke pinggir Jabodetabek, (3) ibu kota pindah ke luar Jawa. Hasilnya kemudian disampaikan kepada Presiden Jokowi baru-baru ini. Dan, seperti biasa, Presiden Jokowi pun sangat “decisive” dengan memutuskan pemindahan ibu kota negara ke luar Jawa sebagaimana yang banyak diberitakan media massa sejak 29 April lalu.

Mendengar dan membaca berita ini, kemudian merefleksikan dengan apa yang pernah penulis sampaikan ke publik hampir sepuluh tahun lalu, penulis merasa saat ini bisa jadi merupakan waktu yang tepat, atau setidaknya lebih tepat daripada pada tahun 2010 atau bahkan 2014, untuk mengambil keputusan politik tersebut. Mengapa? Karena pemerintah telah semakin kuat memajukan kondisinya dalam pembangunan berbagai sarana-prasarana yang dirangsang secara langsung oleh masyarakat luas.

Maka, mengaitkannya dana yang cukup besar untuk “fasilitasnya sendiri” tidak lagi mudah dijadikan “sasaran tere-

bak politik” sebagai keputusan yang tidak bijak dan tidak adil. Lagi pula, banyak provinsi dan kabupaten—tentunya hasil pemecatan seperti Gorontalo, Kepulauan Riau, Maluku Utara, dan Kalimantan Utara—yang telah membangun pusat pemerintahan masing-masing, meski menurut pandangan penulis banyak yang utilitas publiknya sangat rendah karena rancangannya lebih mementingkan kesan megah sebagai penguasa daripada daripada kesan kota kompak untuk pelayanan masyarakat yang efisien dan akrab.

Walaupun keputusan pemindahan ibu kota di masa saja selalu merupakan keputusan politik, pertimbangan-pertimbangan teknis tetap tidak bisa diabaikan. Jangan sampai “morat marut” di masa pemerintah lebih mementingkan fasilitas-fasilitas sendiri menjadi masalah kembali pada masa depan. Dukungan politik—dan finansial—yang terus-menerus juga perlu mendapat perhatian khusus karena dipertanyakan pembangunan ibu kota negara ini akan melewati beberapa masa jabatan seorang presiden. Jangan sampai proyek ini mangkrak terbengkalai karena secara politik dan anggaran tidak dilindungi oleh pimpinan negeri berkeadilan.

Lebih jauh lagi, persebaran pembangunan wilayah tak bisa mengandalkan hanya dengan pemindahan ibu kota negara. Paksi-paksi dapat diambil dari berbagai kasus pemindahan ibu kota dengan tujuan pemerataan wilayah. Brasília, ibu kota negara Brasil, yang dibangun di tengah Amazonia tidak berhasil mendorong pemerataan pembangunan di luar kawasan untuk Timur Brasil mengingat bahwa pemindahan ibu kota negara saja tidak cukup. Beberapa ibu kota negara yang dibangun sama sekali baru seperti Canberra di Australia dan Naypyidaw di Myanmar juga masih sepi setelah puluhan tahun.

Penyebaran pusat-pusat kegiatan komersial—baik berupa industri—agar BUMN ataupun korporasi swasta, menyebar ke kota-kota besar lain di Indonesia, khususnya di luar Jawa, maupun pembangunan berbagai sarana-prasarana yang dirangsang secara langsung oleh masyarakat luas, adalah tujuan utamanya adalah pemerataan pembangunan wilayah. Semoga hal-hal tersebut sudah atau akan dipertimbangkan dalam keputusan politik pemindahan ibu kota negara kali ini.

- Pemindahan IKN memasuki babak baru, tidak lagi pada tahap “**wacana**” tetapi sudah memasuki tahap “**pewujudan**” dengan langkah-langkah di berbagai aspek (legal, politis, teknis, desain dll.), terutama dengan diajukannya RUU IKN oleh pemerintah kepada DPR...
- Walau tentu didasari oleh berbagai **pertimbangan teknis**, keputusan pemindahan ibukota dari Jakarta ke lokasi baru (Kalimantan Timur) adalah **keputusan politis**...
- Paparan ini merupakan catatan kecil tentang pemindahan ibu kota negara dari **sudut pandang pemerhati pembangunan perkotaan yang berkelanjutan** (bermanfaat bagi manusia/masyarakat secara sosial-ekonomi, baik generasi sekarang maupun masa dating, termasuk dengan turut memelihara lingkungan alam), agar dapat dipertimbangkan dalam penyusunan UU-IKN

Latar Belakang – Dunia [Juga Indonesia] Semakin Mengkota

- Semakin besar proporsi penduduk dunia (dan Indonesia) yang tinggal di kawasan perkotaan.

Tingkat urbanisasi dunia:

30% (1950) 751 juta dari 2,5 M

47% (2000) 2,8 M dari 5.9 M

56% (2020) 4,3 M dari 7.6 M

68% (2050) 6,7 M dari 9.8 M

Sumber: United Nations, World Urbanization Prospect, series

Tingkat urbanisasi Indonesia:

1950: 15% → 8,6 juta dari 57 juta

1990: 30% → 55 juta dari 183 juta

2020: 56% → 151 juta dari 269 juta

2045: 73% → 233 juta dari 319 juta

Sumber: BPS dan Bappenas, berbagai publikasi

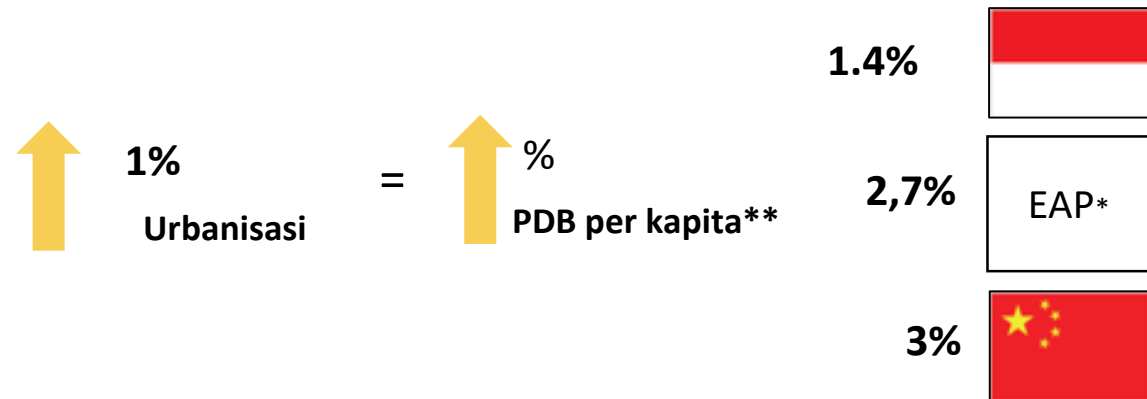
Antara 2020 – 2045 diperkirakan akan ada penambahan sekitar 82 juta penduduk perkotaan

- Proses urbanisasi (menjadi kota, baik melalui migrasi maupun reklasifikasi penggunaan ruang) tidak bisa ditahan, tetapi bisa dikelola/diarahkan

Latar Belakang – Urbanisasi di Indonesia Kalah Menyejahterakan

- Sayangnya pertambahan proporsi penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan (“tingkat urbanisasi”) di Indonesia **kalah menyejahterakan** disbanding yang terjadi di negara-negara tetangga

- Selama kurun waktu 1996 – 2016:



* Negara di East Asia and Pacific (tidak menghitung negara maju, China dan Indonesia)
Sumber: Bank Dunia, 2019

- Mengapa? (1) urbanisasi **terlalu terpusat** di Pulau Jawa, (2) kota-kota kita tumbuh lebih cepat daripada kemampuan penyediaan kebutuhan warga (**tidak ada “model kota”** yang dapat menjadi contoh bagi kota-kota Indonesia lainnya), (3) ...

Latar Belakang – Urbanisasi di Indonesia Terpusat di Pulau Jawa

Skenario 1. Business As Usual

		2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045
Jawa-Bali	Jumlah Penduduk	149,282,800	156,064,600	162,186,100	167,573,500	171,961,800	175,218,900	177,365,100
	Prosentase	58.41%	57.89%	57.42%	56.98%	56.53%	56.07%	55.61%
Luar Jawa	Jumlah Penduduk	106,305,100	113,538,800	120,268,400	126,542,600	132,250,100	137,286,700	141,595,900
	Prosentase	41.59%	42.11%	42.58%	43.02%	43.47%	43.93%	44.39%
Sumatera	Jumlah Penduduk	55,359,300	59,196,800	62,777,100	66,135,000	69,216,200	71,962,800	74,338,200
	Prosentase	21.66%	21.96%	22.23%	22.49%	22.75%	23.03%	23.31%
Kalimantan	Jumlah Penduduk	15,359,300	16,432,900	17,420,200	18,332,400	19,147,000	19,847,500	20,426,700
	Prosentase	6.01%	6.10%	6.17%	6.23%	6.29%	6.35%	6.40%
Nusa Tenggara	Jumlah Penduduk	9,972,800	10,739,300	11,458,800	12,125,900	12,738,100	13,291,200	13,781,500
	Prosentase	3.90%	3.98%	4.06%	4.12%	4.19%	4.25%	4.32%
Sulawesi	Jumlah Penduduk	18,726,500	19,751,300	20,685,700	21,536,000	22,282,300	22,907,900	23,405,700
	Prosentase	7.33%	7.33%	7.32%	7.32%	7.32%	7.33%	7.34%
Maluku	Jumlah Penduduk	2,857,400	3,039,400	3,211,300	3,374,400	3,523,900	3,656,000	3,769,400
	Prosentase	1.12%	1.13%	1.14%	1.15%	1.16%	1.17%	1.18%
Papua	Jumlah Penduduk	4,029,800	4,379,100	4,715,300	5,038,900	5,342,600	5,621,300	5,874,400
	Prosentase	1.58%	1.62%	1.67%	1.71%	1.76%	1.80%	1.84%
Jumlah Penduduk Indonesia		255,587,900	269,603,400	282,454,500	294,116,100	304,211,900	312,505,600	318,961,000

Simulasi yang dibuat oleh Center for Economic and Development Studies FE-UNPAD menunjukkan jika tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan maka proporsi penduduk Jawa – Luar Jawa tidak akan banyak berubah. Dan ini berarti tekanan perkotaan di Pulau Jawa akan semakin besar

Wilayah	Penduduk	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045
Jawa	% Penduduk Kota	63%	67%	71%	74%	78%	82%	86%
	Jumlah Penduduk Kota	92 juta	101 juta	112 juta	120 juta	130 juta	139 juta	148 juta
	% Penduduk Non-Kota	37%	33%	29%	26%	22%	18%	14%
	Jumlah Penduduk Non-Kota	54 juta	50 juta	46 juta	42 juta	37 juta	30 juta	24 juta
	Total Penduduk	146 juta	151 juta	158 juta	162 juta	167 juta	169 juta	172 juta
	% Terhadap Penduduk Indonesia	57%	56%	56%	55%	55%	54%	54%
Luar Jawa	% Penduduk Kota	40%	43%	46%	49%	52%	55%	58%
	Jumlah Penduduk Kota	44 juta	51 juta	57 juta	65 juta	71 juta	79 juta	85 juta
	% Penduduk Non-Kota	60%	57%	54%	51%	48%	45%	42%
	Jumlah Penduduk Non-Kota	66 juta	68 juta	67 juta	67 juta	66 juta	65 juta	62 juta
	Total Penduduk	110 juta	119 juta	124 juta	132 juta	137 juta	144 juta	147 juta
	% Terhadap Penduduk Indonesia	43%	44%	44%	45%	45%	46%	46%
Indonesia	% Penduduk Kota	53%	56%	60%	64%	67%	70%	73%
	Jumlah Penduduk Kota	136 juta	151 juta	169 juta	188 juta	204 juta	219 juta	233 juta
	% Penduduk Non-Kota	47%	44%	40%	36%	33%	30%	27%
	Jumlah Penduduk Non-Kota	120 juta	119 juta	113 juta	106 juta	100 juta	94 juta	86 juta
	Total Penduduk	256 juta	270 juta	282 juta	294 juta	304 juta	313 juta	319 juta

Perubahan Paradigma yang Diharapkan Dari “Jakarta/Jawa-Sentris” ke “Indonesia-Sentris”



- Pembangunan di Indonesia selama ini terlalu “**Jawa-sentris**”, bahkan “**Jakarta-sentris**”. Pemindahan IKN ke lokasi di luar Jawa yang sekaligus secara geografis berada di “tengah-tengah” Nusantara diharapkan dapat mengubah paradigma ini menjadi lebih “**Indonesia-sentris**” ...
- Adalah sebuah kerugian jika **lahan-lahan subur di pulau Jawa** berubah menjadi menjadi lahan perkotaan akibat tekanan urbanisasi...
- Jakarta sudah sangat padat dan banyak masalah, dan sudah semakin tertekan oleh arus urbanisasi/migrasi sehingga **potensi sebagai pusat bisnis/kota global** sulit berkembang optimal...

Pandangan Masyarakat [yang Mendukung]

Dari “content analysis” komentar masyarakat di berbagai media-elektronik

Tentu terdapat pandangan yang menentang maupun yang mendukung pemindahan IKN dengan berbagai alasan. Di antara yang mendukung, terdapat harapan sebagai berikut:

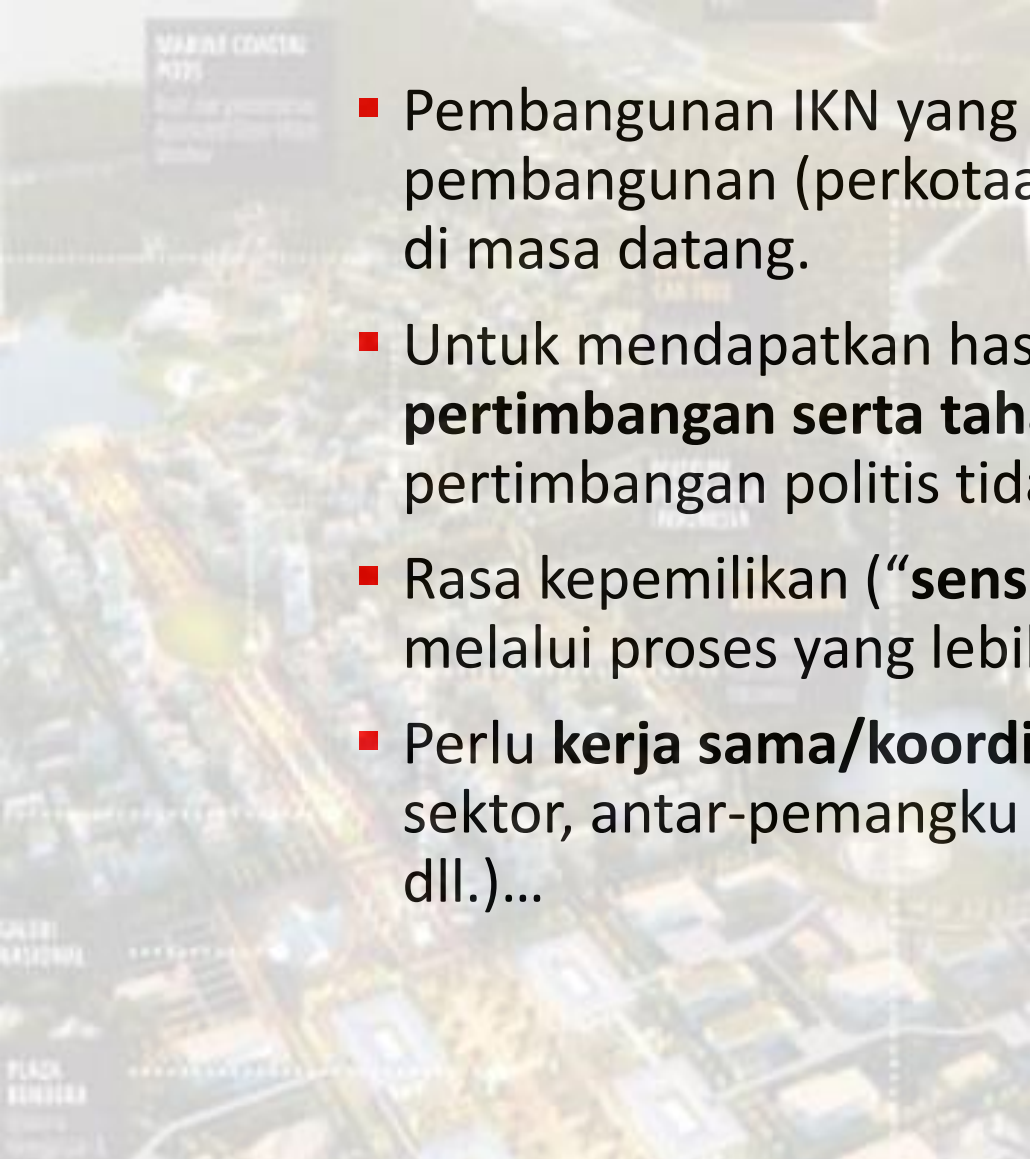
- Dengan diletakkannya IKN baru di Kalimantan, terkandung harapan agar **perhatian** pemerintah terhadap kerusakan lingkungan alam dapat lebih besar sehingga masalah ini teratasi.
- Pembangunan IKN diharapkan juga dapat menjadi **contoh baik pembangunan kota** yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan **berkelanjutan** dan pendekatan **cerdas**.
- Berkelanjutan dalam hal ini memiliki dimensi **sosial** (inklusif, menguatkan modal sosial, dll.), **ekonomi** (menyejahterakan, kondusif untuk iklim usaha, Kerjasama pemerintah-swasta dalam pengembangan kawasan, dll.) serta **lingkungan** (pemeliharaan lingkungan alam dll.)

Banyak Acuan untuk Kota/IKN yang Berkelanjutan



- **Banyak rujukan** yang bisa diacu untuk mewujudkan kota/IKN yang berkelanjutan
- Salah satunya adalah yang **merujuk pada SDGs** (Sustainable Development Goals – Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) **dan NUA** (New Urban Agenda – Agenda Baru Perkotaan) yang telah dikembangkan dan disepakati oleh masyarakat dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (khususnya UN-Habitat)
- Merujuk kepada SDGs, selain aspek keberlanjutan, IKN dapat diupayakan untuk menjadi **kota yang mengedukasi, kota yang menyetakan** dan kota yang ramah bagi semua warga dengan berbagai kebutuhan yang berbeda-beda

Catatan Penutup

- 
- Pembangunan IKN yang baru di luar P. Jawa memang “justified” bagi pembangunan (perkotaan) yang lebih menyejahterakan dan berkelanjutan di masa datang.
 - Untuk mendapatkan hasil yang baik, setiap langkah harus didasari oleh **pertimbangan serta tahapan-tahapan teknis yang matang...** Diharapkan pertimbangan politis tidak mengorbankan pertimbangan teknis
 - Rasa kepemilikan (“**sense of ownership**”) yang luas perlu dibangun melalui proses yang lebih komunikatif dan partisipatif dan multi-pihak...
 - Perlu **kerja sama/koordinasi erat** antar pemerintah (pusat-daerah), antar sektor, antar-pemangku kepentingan (swasta, masyarakat sipil, akademisi dll.)...